

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada prinsipnya Negara telah memberikan perlindungan kepada konsumen pinjaman online sebagaimana diatur sebagai hak-hak konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan juga telah memberikan perlindungan kepada konsumen berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. Akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan pihak kreditur yang melakukan pelanggaran data nasabah adalah bahwa perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur. Sanksi atas pelanggaran data pribadi nasabah diatur di dalam beberapa ketentuan. Sanksi yang dapat dikenai berupa sanksi pidana, sanksi denda maupun sanksi administratif.
2. The authorities of the state shall ensure the protection of personal integrity.” Indonesia dan Norwegia mengatur mengenai prinsip dalam perlindungan data pribadi, Norwegia mengatur mengenai pemberitahuan penerobosan atau terjadinya kegagalan atas perlindungan data pribadi, Pemberitahuan mengenai terjadinya kegagalan atas perlindungan data pribadi dilakukan secara tertulis kepada pemilik data paling lambat 14 hari sejak diketahui terjadinya kegagalan terhadap perlindungan data, Norwegia juga mengatur mengenai persyaratan umum dimana jika terjadi penerobosan terhadap data pribadi wajib diberitahukan kepada supervisory authority (The Norwegian Data Protection Authority) dan pemilik data.

## **B. Saran**

1. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan walaupun banyak peraturan dan Undang-Undang yang ada di Indonesia Dalam hal ini terlihat dengan hanya adanya peraturan tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan takut dengan aturan tersebut. Oleh karena itu tindakan yang harus dilakukan pemerintah adalah untuk lebih mensinergikan peraturan yang sudah di atur Undang-undang agar dapat terciptanya rasa aman bagi masyarakat pemerintah menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. lebih memperhatikan ke legalan pinjaman online yang ada di aplikasi maupun melalui sms dan juga harus sangat di perhatikan bahwa data pribadi setiap orang merupakan salah satu hal yang paling penting.
2. Bagi masyarakat khususnya pengguna aplikasi pinjaman online dihimbau lebih teliti terhadap aplikasi pinjaman online dalam hal ini harus melihat apakah aplikasi tersebut legal atau tidaknya. Dalam hal ini aplikasi dapat dilihat legal ataupun tidaknya bisa dilihat di keterangan apakah aplikasi tersebut sudah diawasi OJK atau belum